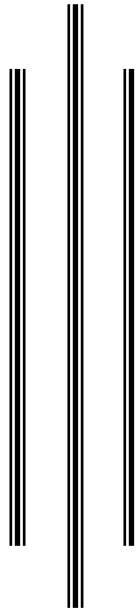




**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN MUARA HARUS
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MUARA HARUS
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Harus tahun 2025 - 2029 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong tahun 2025, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Harus beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan / sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun anggaran 2025.

Kami sadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki tentunya penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mohon saran dan masukan dari semua pihak. Meski demikian kami berharap dengan selesainya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Muara Harus, Juli 2025

CAMAT MUARA HARUS



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina TK.I

NIP.19700914 199503 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	 2
DAFTAR ISI	 3
DAFTAR TABEL	 4
 BAB I	
PENDAHULUAN	 5
1.1 Latar Belakang	 5
1.2 Landasan Hukum	 6
1.3 Maksud dan Tujuan	 8
1.4 Sistematika Penulisan	 9
 BAB II	
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	 10
2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja tahun 2025 terhadap APBD tahun 2025	 10
2.1.2 Ketercapaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025	 17
2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	 23
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	 24
2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD	 25
 BAB III	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 32
 BAB IV	
PENUTUP	 41

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	 1
	1.2 Landasan Hukum	 3
	1.3 Maksud dan Tujuan	 6
	1.4 Sistematika Penulisan	 6
 Tabel	 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	 8
	2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja tahun 2025 terhadap APBD tahun 2025	
	2.1.2 Ketercapaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025	
	2.2 Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	 17
	2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	 23
	2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD	 25
 BAB III	 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 37
 BAB IV	 PENUTUP	 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Kantor Kecamatan Muara Harus sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Perubahan. Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 telah disusun pada tahun 2025 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, menjadi dasar hukum bagi Kecamatan Muara Harus sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tabalong. Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025, Hasil pelaksanaan Renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/245/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Selain berpedoman pada hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Perubahan rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah kabupaten tabalong Nomor 09 tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran daeah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupatem Tabalong tahun 2019 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong.
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/245/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 disusun dengan maksud menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 adalah untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Harus sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

2.1.1 Evaluasi kesesuaian Renja Tahun 2025 terhadap APBD Tahun 2025

2.1.1.1 Kesesuaian Program antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan Evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%, Artinya bahwa jumlah program dalam Renja sama dengan jumlah Program yang ada dalam APBD, yaitu 6 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian kegiatan antara Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 dengan APBD tahun 2025

Berdasarkan Evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%, artinya bahwa jumlah kegiatan dalam Renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD yaitu ada 14 Kegiatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub kegiatan antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan Evaluasi terhadap Sub kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus dengan APBD tahun 2025, Jumlah Sub Kegiatan yang ada di Renja sebanyak 35 sub kegiatan sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 35 sub kegiatan juga.

2.1.1.3 Kesesuaian Pagu Anggaran antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Anggaran Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 sebesar, Rp. 4.975.573.520,- Sedangkan anggaran Kecamatan Muara Harus berdasarkan APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.300.063.670,- Terdapat selisih anggaran antara Renja dengan APBD sebesar Rp. 324.490.150,- Seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini

Tabel 2.1
Hasil evaluasi terhadap kesesuaian antara Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 dengan APBD tahun 2025

No	Uraian	Renja Tahun 2025	APBD Tahun 2025
1	2		5
1.	Program	6	6
2.	Kegiatan	14	14
3.	Sub Kegiatan	35	35
4.	Pagu Anggaran	4.975.573.520,-	5.300.063.670,-

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Muara Harus tahun 2025

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Renja 2025		APBD 2025	
								Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Target capaian kinerja	Anggaran
1						2	3	4	5	6	7
7		UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	KECAMATAN									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai AKIP	BB	4.437.947.063,-	BB	4.789.478.313,-
7	01	01	2	01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		9 dokumen	20.145.352,-	9 dokumen	20.145.352,-
7	01	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.349.294,-	2 dokumen	2.349.294,-
7	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550,-	1 dokumen	1.349.550,-
7	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550,-	1 dokumen	1.349.550,-
7	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.744.106,-	1 dokumen	1.744.106,-
7	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dokumen	1.893.956,-	1 dokumen	1.893.956,-

							DPA-SKPD				
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.469.634,-	1 dokumen	1.469.634,-
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.236.534,-	1 dokumen	1.236.534,-
7	01	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7 Data	8.752.728,-	7 Data	8.752.728,-
7	01	01	2	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 Laporan	2.711.922.360,-	20 Laporan	3.221.547.360,-
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.708.973.000,-	14 bulan	3.218.598.000,-
7	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhrit tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.782.960,-	2 dokumen	1.782.960,-
7	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	1.166.400,-	18 dokumen	1.166.400,-
7	01	01	2	03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen administrasi BMD perangkat daerah	3 dokumen	2.896.776,-	3 dokumen	2.896.776,-
7	01	01	2	03	0001	Penyusunan perencanaan dan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	2.896.776,-	3 dokumen	2.896.776,-
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.703.420,-		8.703.420,-
7	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	8.703.420,-	15 paket	8.703.420,-

7	01	01	2	06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah	100%	300.643.268,-	100%	236.533.268,-
7	01	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	4 paket	1.036.740,-	4 paket	1.036.740,-
7	01	01	2	06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34 paket	39.306.936,-	34 paket	39.306.936,-
							<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	18 paket	8.341.568,-	18 paket	8.341.568,-
7	01	01	2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	12.627.472,-	4 paket	12.627.472,-
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	4.000.000,-	12 dokumen	4.000.000,-
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	235.330.552,-	2 laporan	171.220.552,-
7	01	01	2	07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah unit BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	8 unit	319.861.223,-	2 unit	225.916.373,-
							<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 unit	62.160.000,-	-	-
							<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	9 unit	43.343.690,-	9 unit	43.343.690,-
7	01	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	214.357.533,-	15 Unit	182.572.683,-
7	01	01	2	08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	208.889.452,-	100%	208.850.552,-
7	01	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	25.200.000,-	12 laporan	25.200.000,-
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	183.689.452,-	12 laporan	183.650.552,-

7	01	01	2	09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	19 unit	864.885.212,-	19 unit	864.885.212,-
7	01	01	2	09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	12 unit	118.860.000,-	12 unit	118.860.000,-
7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	19.464.552,-	16 unit	19.464.552,-
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	726.560.660,-	3 unit	726.560.660,-
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	152.517.295,-	80%	152.517.295,-
7	01	02	2	01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 laporan	152.517.295,-	3 laporan	152.517.295,-
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	1 laporan	99.035.211,-	1 laporan	99.035.211,-
7	01	02	2	01	0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	4 Dokumen	53.482.084,-	4 Dokumen	53.482.084,-
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur, dan tata kelola kewilayahan desa	70%	90.054.730,-	70%	82.154.730,-
7	01	03	2	01		KOORDINASI KEGIATAN	Jumlah Pemerintah desa yang dibina / diberdayakan	7 desa	21.100.000,-	7 desa	18.300.000,-

						PEMBERDAYAAN DESA					
7	01	03	2	01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	7 lembaga kemasyarakatan	21.100.000,-	7 lembaga kemasyarakatan	18.300.000,-
7	01	03	2	06		PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN			68.954.730,-		63.854,730,-
7	01	03	2	06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	1.544 keluarga	68.954.730,-	1.544 keluarga	63.854,730,-
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman & Kenyamanan)	100%	107.920.952,-	100%	91.579.852,-
7	01	04	2	01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	107.920.952,-	12 patroli	91.579.852,-
7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	12 laporan	91.579.852,-	12 laporan	91.579.852,-
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	147.209.736,-	80%	147.209.736,-

7	01	05	2	01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 laporan	147.209.736,-	1 laporan	147.209.736,-
7	01	05	2	01	0001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	600 orang	127.849.984,-	600 orang	127.849.984,-
7	01	05	2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	12 dokumen	19.359.752,-	12 dokumen	19.359.752,-
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80%	39.923.744,-	80%	37.123.744,-
7	01	06	2	01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintah desa yang dibina dan diawasi	7 desa	39.923.744,-	7 desa	37.123.744,-
7	01	06	2	01	0002	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	12 Dokumen	21.160.552,-	12 Dokumen	18.360.552,-
7	01	06	2	01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	1 Dokumen	18.763.192,-	1 Dokumen	18.763.192,-

Total		4.975.573.520,-		5.300.063.670,-
-------	--	-----------------	--	-----------------

Berdasarkan data perbandingan antara Renja tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian program sebesar 100%, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100% dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100%. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih ada yang belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaharuinya indikator dan target Renja tahun 2025 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian masih menampilkan target indikator lama.

2.1.1 Ketercapaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Harus sampai Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 2.3

Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Harus sampai Triwulan II Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025		Realisasi capaian target program/kegiatan/sub kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7						UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01					KECAMATAN							
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai AKIP	4.734.046.241	BB	1.706.933.245	36,07%		
7	01	01	2	01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	16.692.624	9 Dokumen	2.173.000	13,02%	50%	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.349.294	2 dokumen	498.000	21,20%	50%	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.349.550	1 dokumen	0	0	0	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.349.550	1 dokumen	0	0	0	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.744.106	1 dokumen	775.000	44,44%	50%	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1.893.956	1 dokumen	0	0	0	

							Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
7	01	01	2	02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.469.634	1 dokumen	900.000	61,24%	50%	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1.236.534	1 dokumen	0	0	0	
7	01	01	2	01	09	Pelaksanaan pengumpulan data statistic sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	5.300.000	7 data	0	0	0	
7	01	01	2	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	3.221.547.360	20 dokumen	1.334.086.965	41,41%	50%	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.218.598.000	15 orang / bulan	1.332.386.965	41,40%	50%	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.782.960	2 laporan	1.700.000	95,35%	50%	
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.166.400	18 laporan	0	0	0	
7	01	01	2	03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen penatausahaan Barang milik daerah yang disusun	2.896.776	3 dokumen	0	0	0	
7	01	01	2	03	01	Penyusunan perencanaan dan kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.896.776	3 dokumen	0	0	0	

7	01	01	2	05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	8.703.420	100 %	0	0	0	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	8.703.420	15 paket	0	0	0	
7	01	01	2	06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	184.553.924	100%	111.014.000	60,15%	50%	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1.036.740	4 paket	0	0		
7	01	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	38.507.592	34 paket	14.809.500	38,46%	50%	
7	01	01	2	06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8.341.568	18 paket	1.718.000	20,60%	22 %	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12.627.472	8 item	6.277.500	49,71%	50%	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.000.000	12 Dokumen	1.490.000	37,25%	50%	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.040.552	12 Laporan	86.719.000	72,24%	50%	
7	01	01	2	07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah alat yang dibeli	225.916.373	22 Unit	137.654.955	60,93%	98%	
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	43.343.690	9 unit	42.700.000	98,51%	98,51%	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	182.572.683	13 unit	94.954.955	52,01%	52,01%	
7	01	01	2	08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	208.850.552	100 %	84.246.547	40,34%	50%	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan	25.200.000	100%	10.529.047	41,78%	50%	

						daya air dan listrik	listrik yang disediakan						
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	183.650.552	100%	73.717.500	40,14%	50%	
7	01	01	2	09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	864.885.212	31 unit	122.004.325	14,11%	50%	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	118.860.000	12 unit	63.499.350	53,42%	50%	
97	01	01	2	09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19.464.552	16 unit	7.140.000	36,68%	50%	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	726.560.660	3 unit	51.364.975	7,07%	50%	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	140.967.295		17.456.000	12,38%	50%	
7	01	02	2	01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	140.967.295	3 laporan	17.456.000	12,38%	50%	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	90.235.211	1 laporan	0	0	0	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.732.084	4 dokumen	17.456.000	34,41%	50%	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan	61.854.730		39.524.000	63,90%	50%	

						KELURAHAN	desa						
7	01	03	2	01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	9.900.000	7 desa	4.950.000	50%	50%	
7	01	03	2	01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.900.000	7 Lembaga kemasyarakatan	4.950.000	50%	50%	
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah keluarga yang dibina dan disejahterakan	51.954.730	1.544 Keluarga	34.574.000	66,55%	50%	
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	51.954.730	1.544 Keluarga	34.574.000	66,55%	50%	
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	55.879.852	100%	16.370.000	29,29%	50%	
7	01	04	2	01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	55.879.852	12 patroli	16.370.000	29,29%	50%	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55.879.852	12 laporan	16.370.000	29,29%	50%	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan	127.489.736	80%	8.610.000	6,75%	50%	

						URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	yang disusun tepat waktu						
7	01	05	2	01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	127.489.736	1 laporan	8.610.000	6,75%	50%	
7	01	05	2	01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	111.129.984	600 Orang	2.550.000	2,29%	50%	
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	16.359.752	12 Dokumen	6.060.000	37,04%	50%	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	28.723.744	80%	23.630.000	82,27%	50%	
7	01	06	2	02		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi	28.723.744	7 desa	23.630.000	82,27%	50%	
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	9.960.552	12 Dokumen	4.950.000	49,70%	50%	
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	18.763.192	1 Dokumen	18.680.000	99,56	100%	

						pembangunan desa							
Total								5.148.961.598		1.812.523.245	35,20%	50%	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Muara Harus sampai dengan Triwulan II di atas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil renja Perangkat daerah sesuai format evaluasi Renja dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Muara harus telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.812.523.245 Atau sekitar 35,20% persen dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran Triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV, di antaranya yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - Sub kegiatan Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
2. Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kabupaten / Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Pelayanan pada kecamatan Muara Harus secara rinci adalah sebagai berikut :

- Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Menggordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Mengoordinasika pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Menggordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang ada di kecamatan

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas di antaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan .Berdasarkan data ada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai Triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

- Beberapa indikator kinerja baik program, kegiatan dan sub kegiatan Renja 2025 belum seluruhnya selaras dengan perubahan Renstra 2025 - 2029 yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penyusunan Renja

2025 dilakukan sebelum ditetapkan Perubahan Renstra, dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja pada Renja agar selaras dengan Perubahan Renstra

- Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai
- Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang IKM, di antaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dilakukannya evaluasi kinerja.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Harus tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, yang dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Muara Harus dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan
2. Masih minimnya koordinasi antar instansi/ unit kerja/ instansi vertikal yang ada di Kecamatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kecamatan.
3. Belum tersedianya dokumen standar pelayanan publik dan atau standar operasional prosedur (SOP) di Kecamatan Muara Harus, hal ini berdampak pada pola pelayanan yang belum terstandar dengan baik.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Reviu terhadap rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Muara Harus tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Muara Harus tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan perubahan Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hasil reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Review terhadap rancangan perubahan RKPD tahun 2025

No	Rancangan RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA	Kec.Muara Harus	Nilai AKIP	BB	4.437.947.063	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA	Kec.Muara Harus	Nilai AKIP	B	4.789.478.313	
1.	PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	20.145.352	PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	20.145.352	
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.349.294	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.349.294	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 dokumen	1.744.106	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1.744.106	

			SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.893.956	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.893.956	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.469.634	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.469.634	
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.236.534	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 dokumen	1.236.534	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Muara Harus	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7 Data	8.752.728			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	7 data	8.752.728	
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	2.711.922.360	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	3.221.547.360	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang / bulan	2.708.973.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang / bulan	3.218.598.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporam	1.782.960	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.782.960	

	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.166.400	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.166.400	
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun	3 dokumen	2.896.776	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah dokumen penatausahaan BMD yang disusun	3 dokumen	2.896.776	
	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	2.896.776	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	2.896.776	
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	8.703.420	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	8.703.420	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Harus	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	8.703.420	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Muara Harus	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 PAKET	8.703.420	
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	300.643.268	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kec.Muara Harus	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	236.533.268	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.036.740	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.036.740	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	39.306.936	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	39.306.936	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	8.341.568	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	8.341.568	

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	12.627.472	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan r	4 paket	12.627.472	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	235.330.552	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	171.220.552	
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah alat yang dibeli	2 Unit	319.861.223	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah alat yang dibeli	24 Unit	225.916.373	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	62.160.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
	Pengadaan mebel	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	43.343.690	Pengadaan mebel	Kec.Muara Harus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	43.343.690	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	214.357.533	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	182.572.683	
67	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Muara Harus	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	208.889.452	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Muara Harus	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	208.850.552	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	25.200.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	25.200.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	183.689.452	Penyediaan jasa pelayumumkantor	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	183.650.552	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	31 unit	864.885.212	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	31 unit	864.885.212	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	118.860.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	118.860.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	19.464.552	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	19.464.552	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	726.560.660	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec.Muara Harus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	726.560.660	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Muara Harus	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	152.517.295	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Muara Harus	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	152.517.295	
8	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Kec.Muara Harus	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 laporan	152.517.295	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Kec.Muara Harus	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	5 laporan	152.517.295	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 laporan	99.035.211	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 laporan	99.035.211	

			Instansi Vertikal Terkait					Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	53.482.084	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	53.482.084	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Muara Harus	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa		90.054.730	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Muara Harus	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa		82.154.730	
9	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Kec.Muara Harus	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	21.100,000	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Kec.Muara Harus	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	18.300.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	21.100.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 desa	18.300.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Muara Harus		1.544 keluarga	68.954.730	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Muara Harus			63.854.730	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec.Muara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	68.954.730	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec.mUara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		63.854.730	
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Muara Harus	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	107.920.952	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Muara Harus	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	91.579.852	

10	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Muara Harus	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	107.920.952	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Muara Harus	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 patroli	91.579.852	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	107.920.952	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	91.579.852	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Muara Harus	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		147.209.736	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Muara Harus	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		147.209.736	
11	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	147.209.736	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Kec.Muara Harus	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	147.209.736	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600 orang	127.849.984	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Muara Harus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600 orang	127.849.984	

	Indonesia										
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	19.359.752	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	19.359.752	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Muara Harus	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		39.923.744	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Muara Harus	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		37.123.744	
12	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Muara Harus	Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi	7 desa	39.923.744	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Muara Harus	Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi	7 desa	37.123.744	
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	21.160.552	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	18.360.552	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	18.763.192	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec.Muara Harus	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	18.763.192	
Total Pagu Rancangan RKPD					4.975.573.520	Total Pagu Perubahan				5.300.063.670	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program – program Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong pada Anggaran Perubahan tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) program dan 14 (Empat belas) kegiatan dan 35 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabalong. Program dan Kegiatan tersebut secara terinci adalah sebagai berikut :

1. Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja Perangkat daerah
- Pelaksanaan pengumpulan data Statistik sektoral daerah

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah

Sub Kegiatan : - Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD

Kegiatan : 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan

Kegiatan : 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan : 6 Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan : - Pengadaan Mebel

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan : 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan : 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program 2 : Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

3. Program 3 : Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Sub Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

4. Program 4 : Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

5. Program 5 : Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Program 6 : Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Rencana Kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini

Tabel 3.1 Perubahan rencana program dan kegiatan Kecamatan Muara Harus Tahun 2025

Kode						Urusan / bidang urusan pemerintahan daerah dan progam / kegiatan / sub kegiatan	Lokasi detail	Rencana tahun 2025 (sebelum perubahan)						Rencana tahun 2025 (setelah perubahan)				Catatan penting	
									Renja 2025			APBD 2025			Perubahan renja				
								Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif	Sumber dana	Indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif		Sumber dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01					KECAMATAN													
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAM DAERAH KABUPATEN.KOTA	Kec Muara Harus	Nilai AKIP	BB	4.437.947.063,-	PAD	BB	4.789.478.313,-	PAD	Nilai AKIP	BB	4.802.245.251,-	PAD	
7	01	01	2	01		PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kec Muara Harus	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	20.145.352,-	PAD	9 dokumen	20.145.352,-	PAD	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	9 dokumen	16.692.624,-	PAD	
7	01	01	2	01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Kec Muara Harus	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.349.294,-	PAD	2 dokumen	2.349.294,-	PAD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.349.294,-	PAD	
7	01	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550,-	PAD	1 dokumen	1.349.550,-	PAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550,-	PAD	

7	01	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550,-	PAD	1 dokumen	1.349.550,-	PAD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.349.550,-	PAD	
7	01	01	2	01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.744.106,-	PAD	1 dokumen	1.744.106,-	PAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.744.106,-	PAD	
7	01	01	2	01	0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.893.956,-	PAD	1 dokumen	1.893.956,-	PAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.893.956,-	PAD	
7	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1.469.634,-	PAD	1 dokumen	1.469.634,-	PAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1.469.634,-	PAD	
7	01	01	2	01	0007	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.236.534,-	PAD	1 dokumen	1.236.534,-	PAD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1.236.534,-	PAD	
7	01	01	2	01	0009	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	Kec Muara Harus	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	7 Data	8.752.728,-	PAD	7 Data	8.752.728,-	PAD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	7 data	5.300.000,-	PAD	

							Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah							Lingkup Perangkat Daerah				
7	01	01	2	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kec Muara Harus	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	2.711.922.360,-	DAU	20 dokumen	3.221.547.360,-	DAU	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan perangkat daerah yang disusun	20 dokumen	3.221.547.360,-	
7	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Muara Harus	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/ bulan	2.708.973.000,-	DAU	15 orang/ bulan	3.218.598.000,-	DAU	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang / bulan	3.218.598.000,-	DAU
7	01	01	2	02	0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Loran keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	1.782.960,-	PAD	2 Laporan	1.782.960,-	PAD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Loran keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	1.782.960,-	PAD
7	01	01	2	02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	1.166.400,-	PAD	18 Laporan	1.166.400,-	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 laporan	1.166.400,-	PAD
7	01	01	2	03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kec Muara Harus	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik daerah yang disusun	3 dokumen	2.896.776,-	PAD	3 dokumen	2.896.776,-	PAD	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik daerah yang disusun	3 dokumen	5.596.776,-	PAD
7	01	01	2	03	0001	Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Kec Muara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	3 dokumen	2.896.776,-	PAD	3 dokumen	2.896.776,-	PAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	5.596.776,-	PAD

						daerah SKPD	Harus	Daerah SKPD											
7	01	01	2	05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kec Muara Harus	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah		8.703.420,-	PAD		8.703.420,-	PAD			17.103.420,-	PAD	
7	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Muara Harus	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	8.703.420,-	PAD		8.703.420,-	PAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	17.103.420,-	PAD	
7	01	01	2	06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kec Muara Harus	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah	100%	300.643.268	PAD	100%	236.533.268,-	PAD	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat daerah	100%	203.003.924,-	PAD	
7	01	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Muara Harus	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	4 item	1.036.740,-	PAD	4 item	1.036.740,-	PAD	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	4 paket	1.036.740,-	PAD	
7	01	01	2	06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec Muara Harus	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34 Paket	39.306.936,-	PAD	34 Paket	39.306.936,-	PAD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34 paket	38.507.592,-	PAD	
7	01	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Muara Harus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	8.341.568,-	PAD	18 Paket	8.341.568,-	PAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	8.341.568,-	PAD	
7	01	01	2	06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec Muara Harus	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	12.627.472,-	PAD	4 Paket	12.627.472,-	PAD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	12.627.472,-	PAD	
7	01	01	2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec Muara Harus	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	4.000.000,-	PAD	12 Dokumen	4.000.000,-	PAD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	4.000.000,-	PAD	
7	01	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kec Muara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	235.330.552,-	PAD	12 Laporan	171.220.552,-	PAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	138.490.552,-	PAD	

						SKPD	Harus	Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
7	01	01	2	07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec Muara Harus	Jumlah alat yang dibeli	11 unit	319.861.223,-	PAD	11 unit	225.916.373,-	PAD	Jumlah alat yang dibeli	2 unit	264.261.963,-	PAD	
7	01	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec Muara Harus	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	62.160.000,-	-	-	-	PAD				PAD	
7	01	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Kec Muara Harus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	43.343.690,-	PAD	9 unit	43.343.690,-	PAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	71.689.280,-	PAD	
7	01	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec Muara Harus	Jumlah unit Peralatan dan mesin kantor lainnya yang disediakan	15 unit	214.357.533,-	PAD	15 unit	182.572.683,-	PAD	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dibeli	15 unit	192.572.683	PAD	
7	01	01	2	08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec Muara Harus	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	208.889.452,-	PAD	100%	208.850.552,-	PAD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	208.850.552,-	PAD	
7	01	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	25.200.000,-	PAD	100%	25.200.000,-	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	25.200.000,-	PAD	
7	01	01	2	08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	183.689.452,-	PAD	100%	183.650.552,-	PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	183.650.552,-	PAD	

7	01	01	2	09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec Muara Harus	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	15 unit	864.885.212,-	PAD	19 unit	864.885.212,-	PAD	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	31 unit	864.885.212,-	PAD	
7	01	01	2	09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec Muara Harus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	118.860.000,-	PAD	12 unit	118.860.000,-	PAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	118.860.000,-	PAD	
7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kec Muara Harus	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	19.464.552,-	PAD	16 unit	19.464.552,-	PAD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	19.464.552,-	PAD	
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec Muara Harus	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	726.560.660,-	PAD	3 unit	726.560.660,-	PAD	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 unit	726.560.660,-	PAD	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Muara Harus	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	152.517.295	PAD	80%	152.517.295	PAD	Persentase pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan	80%	218.473.481	PAD	
7	01	02	2	01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	Kec Muara Harus	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 laporan	152.517.295	PAD	3 laporan	152.517.295	PAD	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 laporan	218.473.481	PAD	
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 laporan	99.035.211	PAD	1 laporan	99.035.211	PAD	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 laporan	112.035.211	PAD	

							Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
7	01	02	2	01	0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerinthanan di tingkat kecamatan	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	53.482.084	PAD	2 laporan	53.482.084	PAD	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	106.438.270	PAD	
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Muara Harus	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	70 %	90.054.730,-	PAD	70%	82.154.730	PAD	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	70%	99.569.530	PAD	
7	01	03	2	01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Kec Muara Harus	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	21.100.000,-	PAD	7 desa	18.300.000	PAD	Jumlah pemerintah desa yang dibina/diberdayakan	7 desa	21.150.000	PAD	
7	01	03	2	01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kec Muara Harus	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga kemasyar akatan	21.100.000,-	PAD	7 Lembaga Kemasya rakatan	18.300.000	PAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyar akatan	21.150.000	PAD	
7	01	03	2	01	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec.M uara Harus	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 Keluarga	68.954.730,-	PAD	1.544 Keluarga	63.854.730,-	PAD	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.544 keluarga	78.419.530,-		
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Muara Harus	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	107.920.952,-	PAD	100%	91.578.852	PAD	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan kenyamanan)	100%	56.204.852	PAD	

7	01	04	2	01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM	Kec Muara Harus	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 Patroli	107.920.952,-	PAD	12 Patroli	91.578.852	PAD	Jumlah patroli terpadu tingkat kecamatan	12 Patroli	56.204.852	PAD	
7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec Muara Harus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	107.920.952,-	PAD	Patroli	91.578.852	PAD	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	56.204.852	PAD	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Muara Harus	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		147.209.736	PAD	80%	147.209.736	PAD	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu		144.209.736	PAD	
7	01	05	2	01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Kec Muara Harus	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	147.209.736	PAD	1 laporan	147.209.736	PAD	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 laporan	144.209.736	PAD	
7	01	05	2	01	0001	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republik	Kec Muara Harus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	600 Orang	127.849.984	PAD	600 Orang	127.849.984	PAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	1 laporan	127.849.964	PAD	

						Indonesia		Kesatuan Republik Indonesia							Indonesia				
7	01	05	2	01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	19.359.752	PAD	12 Dokumen	19.359.752	PAD	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	16.359.752	PAD	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Muara Harus	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		39.923.744,-	PAD	80%	37.123.744	PAD	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		40.470.544	PAD	
7	01	06	2	01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Muara Harus	Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi	7 desa	39.923.744,-	PAD	7 desa	37.123.744	PAD	Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi	7 desa	40.470.544	PAD	
7	01	06	2	01	0002	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	21.160.552,-	PAD	12 Dokumen	18.360.552	PAD	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	21.707.352	PAD	
7	01	06	2	01	0003	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Kec Muara Harus	Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	18.763.192	PAD	1 Dokumen	18.763.192	PAD	Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	18.763.192	PAD	
Total										4.975.573.520			5.300.063.670,-				5.360.869.974,-		

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

Perubahan Rencana Kerja (Renja Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara harus Kabupaten Tabalong tahun 2025.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Catatan penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada perubahan Renja Kecamatan Muara harus tahun 2025 antara lain :

- Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan renja Kecamatan Muara Harus, pada prinsipnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Tabalong
- Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini berpedoman pada perubahan Renstra Kecamatan Muara Harus tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada renstra
- Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini juga berpedoman pada perubahan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2025.

b. Kaidah pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen perubahan Renja Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

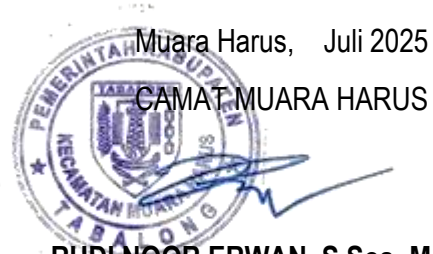
- Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Muara Harus tahun 2025
- Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil reuiu yang dilaksanakan oleh inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan DPRD Kabupaten Tabalong

c. Rencana Tindak lanjut

Rencana tindak lanjut dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Dokumen Renja Kecamatan Muara harus tahun 2025 setiap triwulannya
- Prrogram, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Muara Harus akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparaturnya yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan introspeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Muara Harus, Juli 2025

CAMAT MUARA HARUS

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina TK.I

NIP.19700914 199503 1 006